BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah di dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan. Kajian ini dilakukan dengan tujuan menghindarkan terjadinya pengulangan, peniruan, plagiat, termasuk suaplagiat (Prastowo, 2012: 81). Kajian pustaka selain dari mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian, juga diperlukan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai ke mana terdapat kesimpulan dan generalisasi yang pernah dibuat sehingga situasi yang diperlukan diperoleh (Nazir, 2005:93).

2.1.1 Asimetri Informasi

Informasi yang dimiliki perusahaan cenderung lebih lengkap dan tidak dapat memberikan informasi yang penting dan rahasia pada pihak eksternal. Informasi yang dapat dibagikan oleh manajer hanya berupa laporan keuangan, sedangkan untuk para *stakeholder*, mereka menginginkan informasi yang lebih dan transparan untuk pengambilan keputusan. Informasi yang lebih dan transparan akan memenuhi kebutuhan informasi para calon investor. Ketidakseimbangan informasi yang dimiliki kedua pihak akan memunculkan asimetri informasi (Nadia dan Retnaningtyas, 2013).

2.1.1.1 Definisi Asimetri Informasi

Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan. Menurut Rahmawati (2012:9) asimetri informasi merupakan masalah komunikasi dari perusahaan kepada investor-investor luar. Namun, sering kali terjadi asimteri informasi yang dialami investor, hal ini tentu saja akan menimbulkan kerugian terutama investor yang kekurangan informasi. Menurut Scott (2004:7) asimetri informasi yaitu beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki keunggulan informasi melebihi yang lain.

Begitupun menurut Suprayono (2000:186) asimetri informasi adalah sebagai berikut :

> "Asimetri informasi adalah situasi yang terbentuk karena principal tidak memilki informasi yang cukup mengenai kinerja agen sehingga principal tidak pernah dapat menentukan kontribusi usaha-usaha agen terhadap hasil-hasil perusahaan yang sesungguhnya".

Sedangkan menurut Beaver yang terdapat dalam jurnal Puput Tri Komalasari (2001) menyatakan bahwa asimetri informasi adalah istilah untuk menggambarkan adanya dua kondisi investor dalam perdagangan saham yaitu investor yang *more informed* dan investor yang *less informed*.

Dari teori yang diungkapkan diatas dapat dikatakan bahwa asimetri informasi merupakan masalah komunikasi dari beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi mungkin memiliki keunggulan informasi melebihi yang lain. Oleh karena itu, adanya perbedaan informasi yang diperoleh dapat merugikan investor.

2.1.1.2 Tipe-tipe Asimetri Informasi

Dalam asimetri informasi Scott (2009:8) menyatakan bahwa ada dua tipe dari asimetri informasi, yaitu:

1. *Adverse Selection*

   Adverse selection is a type of information asymmetry where by one or more parties to a business transaction, or potential transaction, have an information advantage over other parties. Berdasarkan definisi ini, *adverse selection* ini timbul karena manajer perusahaan dan orang dalam yang mengetahui lebih banyak mengenai kondisi terkini atau prospek mendatang dari suatu perusahaan daripada investor sebagai pihak lain.

2. *Moral Hazard*

   Moral hazard is a type of information asymmetry where by one or more parties to a bisiness transaction, can obs

   erve their actions in fulfillment of the transaction but other parties cannot. Berdasarkan definisi ini, *moral hazard* timbul karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian yang merupakan karakter sebagian besar entitas bisnis besar.

2.1.1.3 Indikator Asimetri Informasi

Pengukuran terhadap asimetri informasi dapat menggunakan pendekatan *Bid Ask spread* karena pada penelitian-penelitian terdahulu tingkat asimetri ini bisa terlihat dari selisih harga saham tertinggi dan terendahnya. Menurut Amira (2006:37) pengukuran asimetri informasi adalah sebagai berikut:

> "Agar pasar saham dapat beroperasi dengan efektif pasar harus *liquid*, artinya saham dapat dijual seketika pada biaya transaksi yang serendah-rendahnya. Dalam pasar yang *liquid*, harga *bid (bid price)* yaitu harga dimana pialang bersedia membayar atau membeli, sebaliknya hanya sedikit lebih rendah daripada harga *ask (ask spread)* yaitu harga dimana pialang bersedia menerima atau menjual saham."

Asimetri informasi diukur dengan menggunakan *Relative Bid-ask Spread.* Dimana asimetri informasi dilihat dari selisih harga saat *ask* dengan harga *bid* saham perusahaan atau selisih harga jual dan harga beli saham perusahaan selama satu tahun (Rinita Mayanda, 2008:46). Dalam melakukan pengukuran terhadap asimetri informasi, penulis menggunakan proksi *bid-ask spreed*. *Bid-ask spreed* adalah selisih dari harga *bid* dan *ask* sehingga disebut *bid-ask spreed.* Adapun cara mencari *bid-ask spread* ini dapat digunakan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$RBA\ I,t = \frac{(HA\ I,t - HB\ i,t)}{\left\{\frac{(HA\ i,t + HB\ i,t)}{2}\right\}} \times 100$$

Scott (2009:293)

Dimana :

RBA I,t = Asimetri informasi yang diproksikan dengan nilai *bid-ask spread relative* saham perusahaan I yang terjadi pada periode t.

HA i,t = Harga *Ask* tertinggi saham perusahaan I yang terjadi pada periode t

HB I,t = Harga *Bid* terendah saham perusahaan I yang terjadi pada periode t

2.1.2 Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan merupakan komponen total beban pajak penghasilan perusahaan yang mencerminkan pengaruh pajak atas perbedaan temporer antara laba buku (pendapatan yang dilaporkan kepada pemegang saham dan pengguna eksternal lainnya) dan penghasilan kena pajak (pendapatan yang dilaporkan kepada otoritas pajak) (Phillips and Rego**,** 2003).

2.1.2.1 Definisi Beban Pajak

Banyak hal yang dapat mengurangi besar dari laba itu sendiri selain dari adanya biaya operasi yaitu adanya beban pajak. Menurut Dwi Martini, dkk (2012:246) beban pajak adalah sebagai berikut:

> "Jumlah agregat beban pajak kini dan beban pajak tangguhan yang diperhitungkan atas laba akuntansi yang diakui pada suatu periode. Beban pajak akan dipadankan dengan laba akuntansi yang diakui pada periode tersebut".

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2007:197) beban pajak adalah beban yang terdiri atas beban pajak kini dan beban pajak tangguhan atau pendapatan pajak tangguhan.

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa beban pajak merupakan jumlah beban pajak kini dan pajak tangguhan atau pendapatan pajak yang diperhitungkan atas laba akuntansi pada suatu periode.

2.1.2.2 Definisi Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan diakui dan disajikan sebagai beban dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Menurut Waluyo (2008:216) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

> "Pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang *(payable)* atau terpulihkan *(recoverable)* pada tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kompensasi kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan".

Sedangkan menurut PSAK No.46 (IAI, 2009: 8) yaitu sebagai berikut:

> "Pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasi pada periode mendatang".

Demikian juga menurut Harnanto (2003:115) beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak *eksternal*) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak).

Dari beberapa definisi diatas bisa dikatakan bahwa beban pajak tangguhan adalah jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang timbul akibat perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal.

2.1.2.3 Indikator Beban Pajak Tangguhan

Menurut Hernanto (2003:115) penghitungan tentang beban pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan indikator membobot beban pajak tangguhan dengan total aktiva atau total aset. Hal ini dilakukan untuk pembobotan beban pajak tangguhan dengan total aset pada periode t-1 untuk memperoleh nilai yang terhitung dengan proporsional. Sehingga *defered tax expense* dihitung dengan menggunakan rumus:

$$Deferred\ tax\ expense = \frac{DTE_{it}}{TAi, t-1}$$

Hernanto (2003:115)

Dimana :

DTEit = Beban pajak tangguhan perusahaan i pada tahun t

TAi,t-1 = Total asset perusahaan i pada tahun t-1.

2.1.3 Manajemen Laba

Manajemen laba sebagai *disclosure management* dalam pengertian manajemen melakukan suatu intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi (Andreani dan Kiki, 2015).

2.1.3.1 Definisi Manajemen Laba

Manajemen laba adalah hal yang sangat kontroversial di dunia akuntan. Pernyataan umum mengenai apakah manajemen laba baik atau buruk sulit dibuat. Kebanyakan bergantung pada langkah-langkah yang dilakukan dan motivasi dan mendasari dilakukannya manajemen laba. Menurut Islahuzzaman (2012:257) mendefinisikan manajemen laba adalah proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak *eksternal* sehingga dapat meratakan, menaikkan dan menurunkan laporan laba, dimana manajemen dapat menggunakan kelonggaran penggunaan metode akuntansi.

Demikian juga menurut Kieso (2011: 145) mendefinisikan manajemen laba sebagai berikut:

> "*Earning management is often defined as the planned timing of revenues, expenses, gains, and losses to smooth out bumps in earnings".*

Sedangkan menurut Sri Sulistyanto (2008:6) mendefinisikan manajemen laba adalah sebagai berikut:

> "Upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan".

Dari beberapa definisi diatas dapat dikatakan bahwa manajemen laba adalah campur tangan dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri oleh manajemen perusahaan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan.

2.1.3.2 Bentuk-Bentuk Manajemen laba

Menurut Sri Sulistyanto (2008:33) ada beberapa bentuk rekayasa laba yang sering dilakukan pihak manajemen agar laba yang dilaporkan sesuai dengan yang dikehendaki yaitu:

1. *Taking a Bath*

   Disebut juga *big baths*, bisa terjadi selama periode dimana terjadi tekanan dalam organisasi atau terjadi reorganisasi, misalnya pergantian direksi. Bila teknik ini digunakan maka biaya-biaya yang ada pada periode yang akan

datang diakui pada periode berjalan. Ini dilakukan bila kondisi yang tidak menguntungkan tidak bisa dihindari. Akibatnya laba pada periode yang akan datang menjadi tinggi meski kondisi sedang tidak menguntungkan.

2. *Income Minimization*

   Cara ini hampir sama dengan *taking a bath* namun tidak *ekstrim*. Cara ini dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan maksud mengurangi kemungkinan munculnya biaya politis. Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan barang modal dan aktiva tidak berwujud, pembebanan pengeluaran iklan, serta pembebanan biaya riset.

3. *Income Maximization*

   Maksimalisasi laba bertujuan untuk memperoleh bonus yang lebih besar. Selain itu tindakan ini juga bisa dilakukan untuk menghindari pelanggaran terhadap kontrak hutang jangka panjang.

4. *Income Smoothing*

   Perusahaan cenderung lebih memilih untuk melaporkan *trend* pertumbuhan laba yang stabil dari pada perubahan laba yang meningkat atau menurun secara drastis. Perataan laba dapat dicapai dengan suatu ketentuan yang tinggi untuk hutang dan bertentangan dengan nilai asset pada tahun yang baik sehingga ketentuan itu dapat dikurangi. Hal ini dapat mempengaruhi laba yang dilaporkan pada masa yang buruk.

5. *Timing Revenue and Expense Recognition*

   Teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan dengan *timing* suatu transaksi. Misalnya pengakuan *prematur* atas pendapatan.

2.1.3.3 Motivasi Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2008:63) mengemukakan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba:

1. *Bonus Scheme Hypothesis*

   Kompensasi (bonus) yang didasarkan pada besarnya laba yang dilaporkan akan memotivasi manajemen untuk memilih prosedur akuntansi yang meningkatkan keuntungan yang dilaporkan demi memaksimalkan bonus mereka. Bonus minimal hanya akan dibagikan jika laba mencapai target laba minimal tertentu dan bonus maksimal dibagikan jika laba mencapai nilai tertentu atau lebih besar.

2. *Contracting Incentive*

   Motivasi ini muncul ketika perusahaan melakukan pinjaman hutang yang berisikan perjanjian untuk melindungi kreditur dari aksi manajer yang tidak sesuai dengan kepentingan kreditur, seperti *deviden* yang berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan modal kerja atau laporan ekuitas berada di bawah tingkat yang ditetapkan, yang semuanya dapat meningkatkan risiko bagi kreditur, karena pelanggaran perjanjian dapat mengakibatkan biaya yang tinggi sehingga manajer perusahaan berharap untuk menghindarinya. Jadi manajemen laba dapat muncul sebagai alat untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran perjanjian dalam kontrak hutang.

3. *Political Motivation*

   Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan

karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.

4. *Taxation Motivation*

   Perpajakan merupakan motivasi yang paling jelas untuk melakukan manajemen laba. Manajemen berusaha untuk mengatur labanya agar pembayaran pajak lebih rendah dari yang seharusnya sehingga didapat penghematan pajak.

5. *Incentive Chief Executive Officer (CEO)*

   CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.

6. *Initial Public Offering (IPO)*

   Perusahaan yang akan go public belum memiliki nilai pasar, dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan *go public* melakukan manajemen laba dalam prospectus mereka dengan harapan dapat menaikan harga saham perusahaan.

2.1.3.4 Pendekatan Manajemen Laba

Pada umumnya pendeteksian manajemen laba dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *accruals*. Pendekatan ini akan menggunakan pengukuran berbasis akrual (*accrual based measures*) dalam mendeteksi ada tidaknya manipulasi. Menurut Sri Sulistyanto (2008:211) yaitu:

1. Model berbasis *Aggregate Accrual*

Model berbasis *Aggregate Accrual* yaitu Model yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas rekayasa ini dengan menggunakan *discertionary accrual* Sebagai proksi manajemen laba.

2. Model Berbasis *Spesific Accruals*

   Model Berbasis *Spesific Accruals* yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item atau komponen laporan keuangan tertentu dari industri tertentu, misalnya piutang tak tertagih dari sektor industri tertentu atau cadangan kerugian piutang dari industri asuransi.

3. Model Berbasis *Distribution Of Earning After Management*

   Pendekatan ini dikembangkan dengan melakukan pengujian secara statistik terhadap komponen-komponen laba untuk mendeteksi faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan laba.

2.1.3.5 Indikator Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2008:165) manajemen laba dapat diukur dengan *discretionary accrual*. Dalam penelitian ini *discretionary accrual* digunakan sebagai proksi karena merupakan komponen yang dapat dimanipulasi oleh manajer seperti penjualan. *Discretionary accrual* merupakan kebijakan akuntansi yang memberikan keleluasaan kepada manajemen untuk menentukan jumlah transaksi akrual secara fleksibel, atau dengan kata lain, metode *discretionary accrual* memberikan peluang kepada manajer untuk memperbaiki *profit* laba sesuai dengan keinginannya (Sulisyanto dan Wibisosno, 2003:133**)**.

Pencapaian manajemen laba dalam penelitian ini menggunakan komponen akrual yang berfokus pada *discretionary accruals*. *Discretionary accruals* dihitung dari total akrual, karena total akrual dapat menangkap adanya indikasi manajemen laba. Total akrual merupakan selisih antara laba bersih perusahaan terhadap aliran kas dari operasi perusahaan pada periode yang sama. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai ekspektasi akrual atau *nondiscretionary accruals*, kemudian melakukan perhitungan *discretionary accruals* dengan menggunakan persamaan:

$$NDA_t = \propto_1 \left(\frac{1}{A_{t-1}}\right) + \propto_2 (\Delta REV_t) + \propto_3 (PPE_t)$$

Sri Sulistyanto, 2008:165

Keterangan :

ΔREV_t = Perubahan *revenue* perusahaan i pada periode ke t

PPEt = Aktiva tetap perusahaan i pada periode ke t

At- 1 = total aset pada t- 1

$\propto_1 \propto_2 \propto_3$ = parameter spesifik perusahaaan adalah ukuran, kriteria, patokan, pembatasan, standar, atau tolok ukur seluruh populasi dalam penelitian (Eko, 2014:225).

$$TA = NI - CFO$$

(Sri Sulistyanto, 2008:165)

Keterangan :

TA = Total akrual

NI = Laba bersih (*Net income*)

CFO = Arus kas dari operasi (*Cash flow from operation*)

$$DA = TAit - NDAit$$

(Sri Sulistyanto, 2008:165)

Keterangan :

DA = *Discretionary accrual* adalah akrual yang ditentukan oleh manajemen (*management determined*), dimana manajer dapat memilih kebijakan dalam ha1 metoda dan estimasi akuntansi.

Tait = Total *accruals* perusahaan i pada periode t

NDAit = *Non Discretionary accrual* adalah akrual yang ditentukan dari kondisi ekonomi (*economically determined*).

Hasil perhitungan yang menunjukkan adanya praktek manajemen laba adalah nilai *discretionary accruals* perusahaan pada tahun yang diprediksi. Nilai *discretionary accruals* positif berarti perusahaan telah melakukan upaya untuk menaikkan laba, sedangkan untuk nilai *discretionary accru*als negatif berarti

perusahaan telah berupaya menurunkan laba. Apabila perusahaan tidak melakukan praktek manajemen laba maka nilai *discretionary accruals* adalah nol.

2.1.3 Konvergensi *International Financial Reporting Standard* (*IFRS*) dan Manajemen Laba

Konvergensi merupakan mekanisme bertahap yang dilakukan suatu negara untuk mengganti standar akuntansi nasionalnya dengan IFRS. Konvergensi banyak ditemukan di negara berkembang (Nobes dalam Qomariah, 2013: 16). Walaupun belum memasuki tahap adopsi penuh, namun konvergensi menunjukkan perbedaan yang minimal antara standar akuntansi yang diberlakukan dengan IFRS.

Di Indonesia, program konvergensi ke IFRS dilakukan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). DSAK adalah badan yang berwenang menyusun standard akuntansi keuangan untuk entitas privat di Indonesia. Menurut DSAK (dalam Qomariah, 2013: 16-17), tingkat pengadopsian IFRS dapat dibedakan menjadi 5 tingkat sebagaimana berikut :

1. *Full Adoption*, yaitu kondisi ketika suatu negara mengadopsi seluruh standar IFRS dan menerjemahkan IFRS sama persis ke dalam bahasa yang Negara tersebut gunakan.
2. *Adopted*, yaitu kondisi ketika program konvergensi PSAK ke IFRS telah dicanangkan IAI pada Desember 2008. *Adopted* maksudnya adalah mengadopsi IFRS namun disesuaikan dengan kondisi di negara tersebut.

3. *Piecemeal*, yaitu kondisi ketika suatu negara hanya mengadopsi sebagian besar nomor IFRS yaitu nomor standar tertentu dan memilih paragraf tertentu saja.
4. *Referenced (convergence)*, yaitu kondisi ketika standar yang diterapkan hanya mengacu pada IFRS tertentu dengan bahasa dan paragraf yang disusun sendiri oleh badan pembuat standar.
5. *Not adopted at all* yaitu kondisi ketika suatu negara sama sekali tidak mengadopsi IFRS.

Berdasarkan hasil proposal konvergensi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), proses konvergensi IFRS diklasifikasikan kedalam tiga tahap, yaitu tahap adopsi, tahap persiapan, dan tahap implementasi. Jadwal pelaksanaan dari setiap tahapan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Tahap Konvergensi IFRS di Indonesia

No.	Tahap	Keterangan	Tahun
1	Tahap Adopsi	Adopsi seluruh IFRS terakhir ke dalam PSAK.	2008-2010
2	Tahap Persiapan	Penyiapan seluruh infrastruktur pendukung untuk implementasi PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRS.	2011
3	Tahap Implementasi	Penerepan PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRS bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik.	2012

Sumber: Proposal Konvergensi IFRS, IAI (Marasanti, 2013: 113)

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 3 tahap utama dalam implementasi IFRS, yaitu tahap adopsi, tahap persiapan, dan tahap implementasi. Dari ketiga tahap tersebut, tahap adopsi akan dilakukan dengan cara adopsi satu per satu IFRS. Pada tahun 2009, Indonesia belum mewajibkan perusahaan-

perusahaan *listing* di BEI menggunakan sepenuhnya IFRS, melainkan masih mengacu kepada standar akuntansi keuangan nasional atau PSAK. Perusahaan yang memenuhi syarat kemudian sangat dianjurkan untuk mengadopsi IFRS pada tahun 2010. Pada tahun 2012, Dewan Pengurus Nasional IAI bersama-sama dengan Dewan Konsultatif SAK dan DSAK merencanakan untuk menyusun/merevisi PSAK agar secara material sesuai dengan IFRS versi 1 Januari 2009.

Menurut Qomariah (2013: 21) konvergensi PSAK ke IFRS memiliki beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
2. Mengurangi biaya SAK
3. Meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan
4. Meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan
5. Meningkatkan transparansi keuangan
6. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan dana melalui pasar modal
7. Meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan.

IFRS merupakan standar akuntansi yang muncul karena adanya tuntutan globalisasi yang mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk beroperasi lintas negara. Perusahaan-perusahaan multinasional membutuhkan suatu standar akuntansi internasional yang dapat berlaku di seluruh negara. IFRS memberikan penekanan pada penilaian (*revaluation*) profesional dengan *disclosures* yang jelas

dan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu (Situmorang dan Siswanto 2011:8).

Manajemen laba dapat dikatakan sebagai intervensi manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan eksternal sehingga dapat menaikkan atau menurunkan laba akuntansi sesuai kepentingannya (Scott, 2004: 295). Nampak bahwa manajemen laba sebenarnya bukan sebuah kecurangan, tetapi aktivitas manajerial ini merupakan penerapan metode – metode yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum (Sulistyanto, 2008: 12). Semakin sedikit tingkat manajemen laba dalam suatu laporan keuangan, maka semakin berkualitas informasi laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan standar keuangan yang dapat membatasi perilaku manajemen laba, yang kemudian akan meningkatkan kinerja dan kualitas perusahaan itu sendiri. Tindakan manajer dalam melakukan manajemen laba diharapkan dapat berkurang dengan adanya adopsi IFRS, namun dibawah ini beberapa penelitian membuktikan bahwa konvergensi IFRS berpengaruh negative terhadap manajemen laba yang berarti masih ada beberapa perusahan melakukan manajemen laba setelah melakukan konvergensi IFRS. Berikut merupakan hasil penelitian yang membuktikan bahwa konvergensi IFRS berpengaruh negative terhadap manajemen laba :

Tabel 2.2
Penelitian Konvergensi IFRS dan Manajemen Laba

No.	Peneliti /Tahun	Judul Penelitian	Kesimpulan
1.	Dian dan Titik/2011	Pengaruh Konvergensi IFRS Terhadap *Income Smoothing* dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi.	Konvergensi IFRS terbukti berpengaruh negative terhadap *income smoothing.*
2.	Yayu/2012	Manajemen Laba Berbasis Akrual dan Riil Sebelum dan Setelah Adopsi	Tidak ada perbedaan antara manajemen laba akrual dan riil pada

		IFRS.	periode sebelum dan setelah adopsi IFRS secara wajib.
3.	Yunita Eka /2014	Pengaruh Adopsi IFRS, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba.	Adopsi IFRS tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini dikarenakan revisi tujuh PSAK di bawah program konvergensi IFRS tidak menyebabkan perubahan dalam kebijakan akuntansi perusahaan.
4.	Windy dan Hexana /2015	Pengaruh Konvergensi IFRS Efektif Tahun 2012, Kompleksitas dan Profitabilitas Kebangkrutan Perusahaan Terhadap Timeliness dan Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	Konvergensi IFRS pada PSAK yang efektif di tahun 2012 tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Manajemen Laba

Manajer karena kesuperiorannya dalam menguasai informasi akan berprilaku oportunis, prilaku oportunis mengimplikasikan upaya manajer dalam mentransfer kemakmuran pemilik perusahaan kepada dirinya sendiri atas dasar inilah mengapa manajemen laba dinilai sebagai cermin oportunis seorang manajer dengan mempercantik laporan keuangannya (Sri Sulistianto, 2008:23). Bila terjadi asimetri informasi, manajemen perusahaan membuat bias atau memanipulasi laporan keuangan sehingga dapat memperbaiki kompensasi dan reputasi manajemen, serta ratio-ratio keuangan perusahaan (Scott, 2004:13). Kondisi asimetri informasi muncul dalam teori keagenan *(agency theory)*, yaitu *principal* (pemilik/atasan) memberikan wewenang kepada *agent* (manajer/bawahan) untuk mengatur perusahaan yang dimiliki. Karena *principal* tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja *agent*, *principal* tidak pernah tahu pasti bagaimana usaha *agent* memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan, situasi ini disebut sebagai asimetri informasi (Anthony dan Govindarajan,

2001:270). Dengan adanya perbedaan kepentingan maka jelas bahwa asimetri informasi akan mendorong terjadinya manajemen laba oleh manajemen. Adanya asimetri informasi akan mendorong manajemen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja manajer (Nadia dan Retnaningtyas, 2013).

Menurut Sri Sulistyanto (2008:84) Semakin tinggi nilai *Bid-Ask Spread* berarti semakin besar kesenjangan informasi yang dimiliki oleh manajemen dengan informasi yang dimiliki oleh investor mengenai harga saham perusahaan, dan semakin besar pula dorongan bagi manajer untuk merekayasa labanya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan	Kesimpulan
1	Wiyadi, dkk/ 2016	Pengaruh Asimetri Informasi, *Leverage* dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba *Riil* Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia	Variabel Independen (*Leverage* dan Profitabilitas) dan Indikator Manajemen Laba	Variabel asimetri informasi secara signifikan berpengaruh terhadap manajemen laba.
2	Desmiya wati, dkk/ 2009	Pengaruh Asimetri Informasi, Ukuran Perusahaan dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Praktik Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2012	Variabel Independen (Ukuran Perusahaan) dan Tahun pada Populasi.	Maka dapat disimpulkan bahwa Ha1 diterima artinya secara parsial variabel asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba.
3	Gede dan Made/ 2015	Pengaruh Asimetri Informasi dan Kepemilikan Manajerial pada Praktek Manajemen Laba	Variabel Independen (Kepemilikan Manajerial) dan Tahun Sampel	Asimetri informasi secara positif berpengaruh pada praktek manajemen laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013.

2.2.2 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

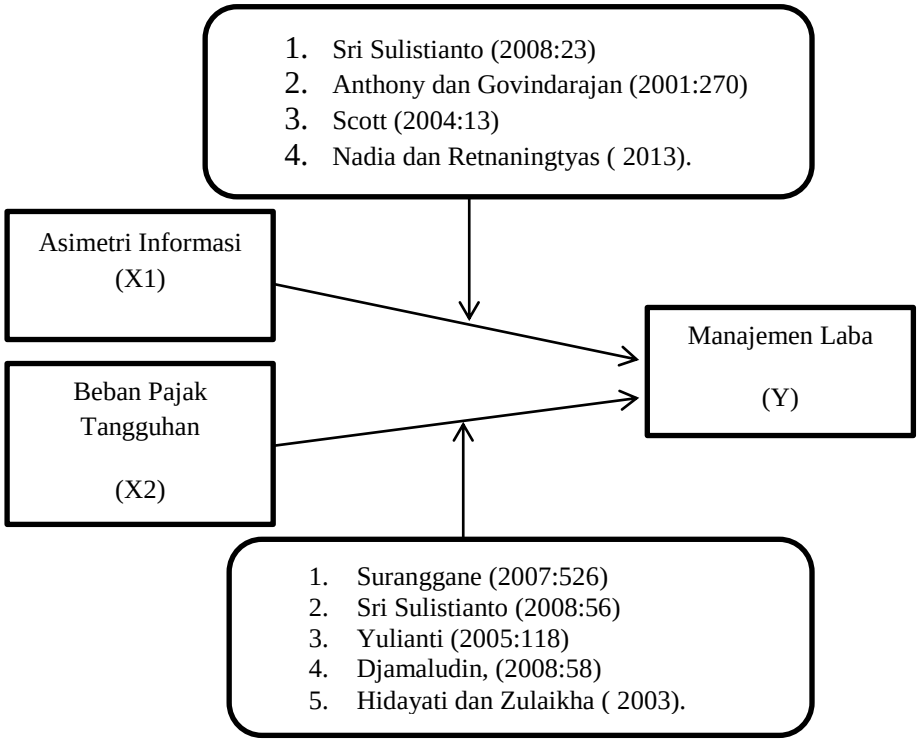
Ada banyak cara yang dilakukan manajer untuk mempengaruhi laporan keuangan misalnya keputusan mengenai umur ekonomis dan nilai sisa residu aktiva jangka panjang, kewajiban manfaat pension dan manfaat *post employment* yang lain, pajak ditangguhkan, kerugian piutang tak tertagih dan kerusakan aktiva (Sri Sulistianto 2008:56). Banyak manajer yang memanfaatkan peluang untuk merekaya angka laba *(earnings management)* pada perusahaannya dengan rekayasa akrual untuk mempengaruhi hasil akhir dari berbagai keputusan antara lain adanya motivasi bonus, dianggap kinerjanya lebih baik atau meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan (Suranggane, 2007:526). Tujuan manajemen laba adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada, maka manajemen laba secara hakikat ekonomisnya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak *(after tax return)* karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali (Suandy, 2008:98).

Semakin besar presentase beban pajak tangguhan terhadap total beban pajak perusahaan menunjukkan standar akuntansi yang semakin *liberal* (Yulianti, 2005:118). Perbedaan laba akuntansi dengan laba *fiscal* memiliki hubungan positif dengan insentif pelaporan keuangan seperti *financial distress* dan pemberian bonus, dengan adanya hal tersebut maka dimungkinkan manajer dapat melakukan rekayasa laba atau *earning management* dengan memperbesar atau memperkecil jumlah beban pajak tangguhan yang diakui dengan laporan laba

rugi. Selisih *negative* antara laba akuntansi dan laba fiscal mengakibatkan terjadinya koreksi *negative* yang menimbulkan terjadinya beban pajak tangguhan (Djamaludin, 2008:58). Sering juga manajer memanfaatkan peluang untuk merekayasa angka laba *(earnings management)* dengan rekayasa akrual untuk mempengaruhi hasil akhir dari berbagai keputusan *riil* agar kinerjanya dianggap lebih baik, atau untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan (Hidayati dan Zulaikha, 2003).

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan	Kesimpulan
1	Ulfa/ 2013	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Praktik Manajemen Laba	Variabel Independen (Perencanaan Pajak)	Bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba, perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
2	Taufik Budiman/ 2013	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Akrual Terhadap Indikasi Adanya Praktik Manajemen Laba	Variabel Independen (Akrual) dan Indikator Variabel	Menemukan hasil bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap adanya indikasi praktik manajemen laba,
3	Yulianti / 2005	Kemampuan Beban Pajak Tangguhan dalam Mendeteksi Manajemen Laba	Sampel Perusahaan dan Indikator Beban Pajak Tangguhan	Penelitian ini menemukan bahwa kedua pengukur manajemen laba (akrual dan beban pajak tangguhan) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan melakukan manajemen laba untuk menghindari manajemen laba.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Suharsimi Arikunto (2013:110) mengartikan hipotesis adalah sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara dan akan dicari kebenarannya melalui pengumpulan data dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis merumuskan hipotesis adalah sebagai berikut:

1. H1 : Terdapat pengaruh asimetri informasi terhadap manajemen laba pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I pada tahun 2009-2015.

2. H2 : Terdapat pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I pada tahun 2009-2015.